KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KKP 2025 EKONOMI BIRU INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA 2025

INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat I dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai secara tahunan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan laporan kinerja sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain hal tersebut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat I dan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun ekternal Inspektorat I, atas kerja samanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat I selama Tahun 2025. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas kinerja pengawasan intern. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat I khususnya dan Inspektorat Jenderal KKP.

Januari, 15 Januari 2026
Inspektur I,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Inspektorat I memiliki tugas dan Fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi serta Pusat Kebijakan Strategis dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Pengelolaan Kelautan, serta Pusat Data dan Informasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Inspektorat I didukung anggaran sebesar Rp774.637.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan dukungan operasional pengawasan.

Dalam rangka mendukung kinerja Inspektorat Jenderal KKP, Inspektorat I menetapkan 2 Sasaran Kinerja yang terdiri dari Sasaran Kinerja 1 (SK.01) “Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I” dan Sasaran Kinerja 2 (SK.02) " Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I”. Selanjutnya Sasaran Kinerja tersebut dijabarkan kedalam 7 indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025. Capaian kinerja yang telah dilakukan pengukuran melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id) sebesar **112,75**% atau berada pada level **“Istimewa”**, capaian kinerja Tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 107,47% atau berada pada level **“Baik”**.

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan komulatif dari hasil capaian sasaran kinerja yang dijabarkan kedalam 7 indiktor kinerja, dengan nilai capaian sebagai berikut : 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I mencapai nilai 0,17% dari target ≤ 0,5%; 2) Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I sebesar 88,98% dari target 86%; 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I sebesar 90,66% dari target 85%; 4) Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi), telah tersusun 9 rekomendasi dari target 4 rekomendasi atau capaian sebesar 225% ; 5) Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai) sebesar 94,51% dari target 85% atau nilai capaian sebesar 111,19%; 6) Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I sebesar 98,90% dari target 80% atau capaian sebesar 123,63%; 7) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I sesuai dengan target yaitu 100%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dari sisi kinerja anggaran, pagu anggaran Tahun 2025 Inspektorat I setelah adanya kebijakan efisiensi sebesar Rp774.637.000,00, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,92% atau sebesar Rp774.028.423,00 dari pagu anggaran efektif. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien dikarenakan dengan penggunaan input anggaran yang lebih kecil dapat mencapai kinerja organisasi sebesar 112,75% atau pada level “Istimewa” Dimana rincian masing-masing indikator telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai melalui penerapan pengawasan berbasis risiko sehingga pengawasan Itjen lebih tepat sasaran, penggabungan beberapa pengawasan pada mitra kerja untuk menghindari pelaksanaan pengawasan yang bertubi-tubi dan pemanfaatan teknologi informasi pada pelaksanaan pengawasan. Penggunaan anggaran tersebut untuk pelaksanaan pengawasan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap mitra dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, adapun pengawasan yang telah dilakukan yaitu pelaksanaan pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan zona integritas dan sistem pengendalian internal serta kegiatan manajerial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. DASAR HUKUM 2
C. TUGAS DAN FUNGSI 2
D. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL 3
E. SUMBER DAYA 4
F. DASAR PENGUKURAN KINERJA 6
G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA 6
H. RUANG LINGKUP 6
I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA 6
J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA 6
K. SISTEMATIKA LAPORAN 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8
A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025-2029 8
1. Visi KKP dan Itjen KKP 8
2. Misi Itjen KKP 9
3. Tujuan Itjen KKP 9
4. Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja Itjen dan Inspektorat I 10
B. RENCANA KERJA ANGGARAN 11
C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2025 11
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2024 12
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT I 16
B. CAPAIAN KINERJA 16
1. SK.01 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I 18
2. SK.02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I 26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN 30
1. Realisasi Anggaran Kegiatan 30
2. Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 32
3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran 32
D. REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA 35
BAB IV PENUTUP 36
A. KESIMPULAN 36
B. PERMASALAHAN 37
C. LANGKAH PERBAIKAN 37
D. Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi 38
LAMPIRAN 39

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manuasia Inspektorat I Tahun 2025 5
Tabel 2. Sasaran Kinerja Inspektorat Jenderal dan Inspektorat I Tahun 2025 10
Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektrat I Tahun 2025 12
Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat I Tahun 2025..... 14
Tabel 5. Rentang Penilaian Capaian Kinerja..... 16
Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 - 2025 17
Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 18
Tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Intern yang Bernilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra (SK.01) Tahun 2025 18
Tabel 9. Capaian IK-1 Tahun 2025 20
Tabel 10. Perbandingan Capaian IK-1 Tahun 2024 dan Tahun 2025..... 20
Tabel 11. Perbandingan Capaian IK-1 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 2025-2029..... 20
Tabel 12. Capaian IK-2 Tahun 2025 21
Tabel 13. Perbandingan Capaian IK-2 dengan Target Jangka Menengah 22
Tabel 14. Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2025..... 23
Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2024 dan Tahun 2025 23
Tabel 16. Perbandingan Capaian IK-3 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah..... 23
Tabel 17. Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2025..... 25
Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2024 dan Tahun 2025 25
Tabel 19. Perbandingan Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah..... 26
Tabel 20. Capaian Sasaran Kinerja (SK.02) Tahun 2025..... 26
Tabel 21. Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2025 27
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024 dan 2025 28
Tabel 23. Perbandingan Capaian IK-5 tahun 2025 dengan target Jangka Menengah..... 28
Tabel 24. Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2025..... 28
Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2024 dan 2025 29
Tabel 26. Perbandingan Capaian IK-6 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah..... 29
Tabel 27. Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2025..... 29
Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2024 dan 2025 30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 29. Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025 31
Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2024 dan Tahun 2025 .. 31
Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 32
Tabel 32. Efisiensi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025 Per Jenis Capaian kinerja 34

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat I Tahun 2025 5
Gambar 2. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggung jawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya prinsip akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi, serta Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Inspektorat I sebagai salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP telah menyusun program/kegiatan dalam rangka mendukung terlaksananya program Reformasi Birokrasi dan mengawal Program Ekonomi Biru yang merupakan program andalan dengan memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan sekaligus memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap adanya potensi penyimpangan/kecurangan. Untuk mengetahui keberhasilan dari program/kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Inspektorat I melakukan pengukuran secara periodik sebagai tindakan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja, selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan atau aksi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan.

B. DASAR HUKUM

Inspektorat I melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Inspektorat I memiliki tugas dan Fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi serta Pusat Kebijakan Strategis dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Pengelolaan Kelautan, serta Pusat Data dan Informasi. Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan Pusat Data dan Informasi;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan Pusat Data dan Informasi;
3. Pelaksanaan pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data - 81 -

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan Pusat Data dan Informasi terhadap kinerja, keuangan, dan nonkeuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan Pusat Data dan Informasi;
5. Pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi, dan Pusat Kebijakan Strategis, serta unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, dan Pusat Data dan Informasi;
6. Pelaporan hasil pengawasan intern pada pada Setjen, Ditjen PKRL, Pusdatin, Pusat Kebijakan Strategis dan UPT lingkup Ditjen PKRL serta Pusdatin;
7. Pengawasan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat I.

D. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL

Kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal KKP berdasarkan dokumen Renstra Tahun 2025-2029 difokuskan pada upaya:

a. Mendorong terwujudnya kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang efektif dan efisien, melalui pengawasan berbasis risiko, kinerja, dan prioritas strategis, guna memastikan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat;
b. Mendorong penguatan sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, melalui peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta perbaikan proses bisnis dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
c. Membangun dan memperkuat budaya integritas di lingkungan KKP, melalui pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, kebijakan pengawasan intern Inspektorat Jenderal juga diarahkan untuk mengawal dan memastikan terintegrasinya lima pengarusutamaan pembangunan untuk memperluas manfaat hasil pembangunan, meminimalkan dampak negatif yang tidak diinginkan, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya dan kualitas lingkungan hidup.

Lima pengarusutamaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Tahun 2025 – 2029, meliputi:

a. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial, untuk memastikan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.
b. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), guna menjamin keselarasan program KKP dengan agenda pembangunan nasional dan global yang berkelanjutan.
c. Pengarusutamaan Transformasi Digital, dalam rangka mendorong efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta layanan sektor kelautan dan perikanan.
d. Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon, untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.
e. Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim, guna meningkatkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim.

Melalui arah kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu berperan secara optimal dalam memastikan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang akuntabel, berintegritas, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

E. SUMBER DAYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I didukung oleh sejumlah sumber daya dengan gambaran sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

   Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat I pada Tahun 2025 sebanyak 33 orang, namun terdapat 1 (satu) pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, rincian pegawai Inspektorat I tersaji pada tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat I Tahun 2025

Jabatan	Jumlah
Inspektur I	1 orang
Auditor Utama	2 orang
Auditor Madya	7 orang
Auditor Muda	10 orang
Auditor Pertama/Auditor Pelaksana	11 orang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
Perencana Muda	1 orang
Analis APK-APBN Muda	1 orang
Pengadministrasi Perkantoran	1 orang
Penata Layanan Operasional	1 orang
Operator Layanan Operasional	1 orang
Pengemudi (PJLP)	1 orang
Jumlah	**38 orang**

Adapun struktur organisasi Inspektorat I Tahun 2025 sebagaimana gambar berikut

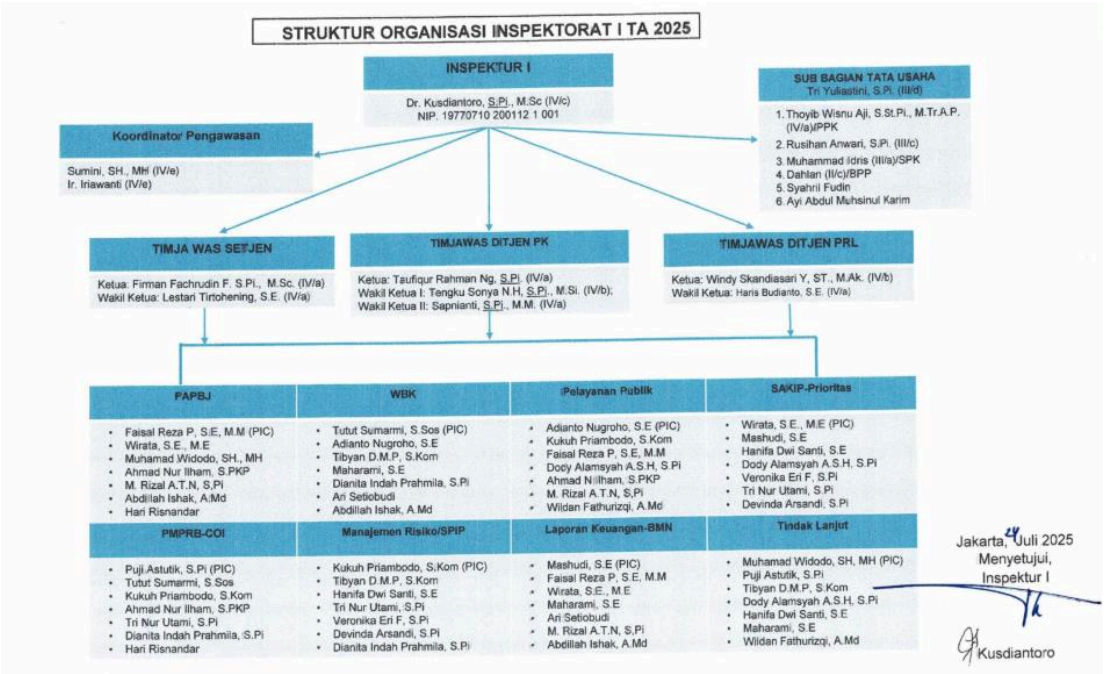

Gambar 1. Struktur Organisasi

2. Anggaran

Pagu anggaran efektif Inspektorat I Tahun 2025 sebesar Rp774.637.000,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan, dengan rincian 1). Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sebesar Rp366.992.000,00, 2). Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I sebesar Rp33.190.000,00, 3). Pengawasan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp313.239.000,00 dan 4). Dukungan Operasional Pengawasan sebesar Rp61.216.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

F. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/ PERMEN-KP /2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.
5. Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor SP DIPA- 032.02.0/2024 tanggal 2 Desember 2024.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dan capaian atas target jangka menengah sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat I.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran terhadap dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat I dan Perjanjian Kinerja Level 2 Tahun 2025 yang disepakati Inspektur I dengan Inspektur Jenderal KKP.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2025
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Desember 2025

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat I berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pengukuran atas Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat I Tahun 2025.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup latar belakang, program kerja pengawasan tahunan, tugas dan fungsi, sumber daya, dasar dan tujuan, ruang lingkup, waktu dan metodologi pengukuran kinerja; 2) Perencanaan Kinerja Tahun 2025 mencakup Renstra Itjen KKP, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Inspektorat I, Capaian Kinerja Tahun 2025, dan Analisis Sumber Daya Anggaran; dan 4) Penutup yang merupakan kesimpulan dari isi laporan serta saran untuk perbaikan kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025 - 2029

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal (Renstra Itjen) nantinya digunakan sebagai acuan/pedoman bagi unit kerja di lingkungan Itjen KKP dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja, dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Renstra Itjen merupakan dokumen perencanaan 5 tahun kedepan yang disusun berdasarkan capaian-capaian kinerja selama tahun 2020-2024 serta isu-isu strategis yang berkembang sebagai tantangan Itjen KKP dalam mengawal program strategis KKP yang telah ditetapkan.

Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2025-2029 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai bagian dari unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 tahun yang merupakan perwujudan dari Visi Presiden dan Wakil Presiden yang menggambarkan peran dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan visi tersebut KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui: (1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan; serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan.

Selain hal tersebut dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. “Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. “Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita 7.

Itjen merupakan bagian dari KKP yang mempunyai tanggungjawab dalam mengawal keberhasilan program/kegiatan strategis KKP perlu menyelaraskan dengan visi dan misi KKP, untuk itu Itjen telah menetapkan visi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengawasan Intern yang Andal dan Bernilai Tambah Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”

Dari visi tersebut diharapkan pelaksanaan pengawasan dalam mengawal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud melalui bentuk “trusted advisor”. Itjen selalu melakukan inovasi dalam pelaksanaan pengawasan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan mitra melalui pengawasan intern berkualitas yang dilaksanakan sepenuhnya untuk menjawab kebutuhan unit kerja mitra dan para pemangku kepentingan melalui aktivitas penjaminan kualitas *(quality assurance)* dan pemberian layanan konsultansi *(advisory services)*, serta peningkatan kualitas GRC *(Governance, Risk, and Compliance)* terhadap arah kebijakan strategis dan tujuan KKP.

2. Misi Itjen KKP

Misi yang telah disusun merupakan penjabaran dari visi Itjen KKP, adapun misi Itjen KKP adalah dengan “**Menyelenggarakan pengawasan intern yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”**.

Sehingga dengan misi ini Itjen KKP dapat memberikan masukan dan peringatan dini (*aerly warning system*) kepada unit kerja dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program/kegiatan strategisnya.

3. Tujuan Itjen KKP

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Jenderal sebagaimana diruraikan di atas, tujuan dari penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP adalah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

"Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan".

4. Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja Itjen dan Inspektorat I

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja eselon I merupakan Sasaran Program yang menjabarkan kondisi yang harus dicapai atau diwujudkan dalam tataran operasional sebagai ukuran dari tercapainya tujuan. Sasaran Program diukur melalui indikator kinerja yang menjadi ukuran kualitatif atas tercapainya Sasaran Program.

1. **Sasaran Pertama**, yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP. Sasaran tersebut merupakan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi KKP yang diukur melalui indikator kinerja terkait nilai temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, implementasi Reformasi Birokrasi KKP, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP, dan kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Inspektorat Jenderal.
2. **Sasaran Kedua**, yaitu Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal. Sasaran tersebut menjadi bentuk keseriusan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Sasaran tersebut diimplementasikan dengan beberapa ukuran indikator kinerja mengenai kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal, implementasi sistem informasi pengawasan, dan implementasi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam menjamin tercapainya sasaran program atas penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP, dirumuskan indikasi risiko pada masing-masing sasaran program. Indikasi risiko tersebut menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern beserta dukungan manajemen penyelenggaraan pengawasan intern. Perumusan indikasi risiko terhadap sasaran program sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikasi Risiko Inspektorat Jenderal KKP

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	1. Kurangnya kematangan manajemen risiko yang menghambat implementasi pengawasan intern berbasis risiko

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
		2. Adanya praktik KKN yang menyebabkan rendahnya integritas pada penyelenggaraan pemerintahan 3. Ketidaktepatan perumusan program kerja pengawasan intern yang menyebabkan kurangnya relevansi fokus pengawaan dengan tujuan
2.	Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal	Kurangnya daya dukung sumber daya pengawasan intern yang menyebabkan turunnya kualitas pengawasan intern

B. RENCANA KERJA ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengawasan terhadap program/kegiatan strategis mitra serta dukungan manajerial, Inspektorat I mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp774.637.000,00** (pagu efektif) yang terdiri dari:

1. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar **Rp366.992.000,00**;
2. Dukungan Operasional Pengawasan sebesar **Rp61.216.000,00**;
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I dengan alokasi anggaran sebesar **Rp33.190.000,00**;
4. Pengawasan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dengan alokasi anggaran sebesar **Rp313.239.000,00**.

C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2025

Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Itjen, Inspektorat I selaku unit pelaksana pengawasan internal dengan mitra kerja Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK) dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kinerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan target yang telah ditetapkan, selanjutnya perihal target tersebut dituangkan dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat I sebagaimana disampaikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2.	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86
		3.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85
		4.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	5.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85
		6.	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT I TAHUN 2025

Inspektorat I melalui pelaksanaan Pengawasan Akuntablitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2024 melaksanakan kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan kinerja pembangunan kelautan dan Perikanan/kegiatan prioritas KKP
   a. Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisais Anggaran Kegiatan LAUTRA;
   b. Pemantauan Penerbitan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
   c. Evaluasi Pengelolaan PNBP lingkup mitra Inspektorat I;
2. Pengawasan kegiatan prioritas Presiden;
   Probity Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan atas kegiatan swasembada garam nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pengawasan mandatori
    a. Reviu Laporan Keuangan lingkup mitra Inspektorat I;
    b. Reviu Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP mitra Inspektorat I;
    c. Evaluasi Pelayanan Publik mitra Inspektorat I;
    d. Evaluasi Implementasi SAKIP mitra Inspektorat I;
    e. Reviu RKA-K/L terhadap Pagu Indikatif dan Definitf Tahun 2025 mitra Inspektorat I;
    f. Reviu RKBMN Tahun 2027 mitra Inspektorat I;
    g. Reviu Laporan Kinerja (Lkj) mitra Inspektorat I;
    h. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan mitra Inspektorat I;
    i. Reviu Pengelolaan Kas dan Barang Persediaan mitra Inspektorat I.
4. Pengawasan dengan tujuan tertentu/tematik
    a. Evaluasi Kepegawaian;
    b. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko Tahun 2025 dan Asistensi MR Tahun 2026 mitra Inspektorat I;
    c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mitra Inspektorat I;
    d. Telaah Sejawat Internal;
    e. Pengawasan Tematik lainnya;
5. Pengawasan pembangunan budaya integritas
    a. Asistensi/Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mitra Inspektorat I.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai target yang ditetapkan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Inspektorat I telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan terukur, Adapun rincian Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU INSPEKTORAT I TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IK	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala											
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	Inspektorat V	1 Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektorat I	81.546.000	5	Kegiatan	2						3					
				Inspetorat III	2 Reviu Laporan Kinerja Mitra Inspektorat I	0	2	Kegiatan		2										
				Inspektorat I	3 Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNBP	0	3	Kegiatan		3										
				Inspektorat I	4 Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024-2025	379.852.000	5	Kegiatan	5											
				Inspektorat I	5 Probity Audit Pelaksanaan PBJ	0	1	Kegiatan											1	
				Inspektorat I	6 Pendampingan Perencanaan, Persiapan dan Pelaksanaan Modelling Garam	0	2	Kegiatan					1					1		
				Inspektorat I	7 Pemantauan Kegiatan pada Kebijakan Pengawasan Perluasan Kawasan Konservasi Laut	0	2	Kegiatan					1						1	
				Inspektorat I	8 Pemantauan Kegiatan pada Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	2	Kegiatan					1						1	
				Inspektorat I	9 Pemantauan Kegiatan pada Kebijakan Pembersihan Sampah Plastik di Laut	0	2	Kegiatan					1						1	
				Inspektorat I	10 Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL) Pagu Indikatif TA 2026	0	3	Kegiatan							3					
				Inspektorat I	11 Evaluasi Tata Kelola Perizinan PKKRL	0	1	Kegiatan							1					
				Inspektorat I	12 Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko TA 2025	0	3	Kegiatan									3			
				Inspektorat I	13 Pemantauan Kegiatan LAUTRA TA 2024-2025	0	5	Kegiatan								5				
				Inspektorat I	14 Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2027	0	3	Kegiatan									3			
				Inspektorat I	15 Evaluasi Pengelolaan BLU LPMUKP	0	1	Kegiatan											1	
				Inspektorat I	16 Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAKL) Pagu Definitif TA 2026	0	3	Kegiatan										3		
				Inspektorat I	17 Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Kegiatan Tahun 2026	0	3	Kegiatan						3						
				Inspektorat V	18 Asistensi Penyusunan Tabel A PIPK pada Mitra Kerja	0	2	Kegiatan						2						
				Inspektorat V	19 Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	0	3	Kegiatan												3
				Inspektorat V	20 Reviu Pengelolaan Kas	0	3	Kegiatan												3
				Inspektorat I	21 Pemantauan Pengelolaan Hibah Luar Negeri	0	1	Kegiatan				1								

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86	Inspektorat I	22 Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK	0	2	Kegiatan			2											
				Inspektorat III	23 Evaluasi Implementasi SAKIP 2024	0	3	Kegiatan							3							
				Inspektorat I	24 Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK	0	2	Kegiatan							2							
				Inspektorat I	25 Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP	0	3	Kegiatan										3				
				Inspektorat IV	26 Pemantauan Implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan	0	3	Kegiatan									3					
				Inspektorat I	27 Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	0	1	Kegiatan										1				
				Inspektorat II	28 Evaluasi Pelayanan Publik	0	4	Kegiatan					4									
		3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	Inspektorat I	29 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	0	11	Kegiatan			2			3			3				3
		4. Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	Inspektorat I	30 Kajian/Evaluasi/Riviu Kebijakan lingkup mitra	0	4	Kajian						2							2
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	5. Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85	Inspektorat IV	31 Telaah Sejawat Internal	0	1	Kegiatan				1										
		6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80	Sekretariat Itjen	32 Pelaksanaan pengawasan melalui sistem informasi (aplikasi AMS)	0	2	Kegiatan						1							1
		7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100	Inspektorat I	33 Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	0	12	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Inspektorat I	34 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	0	12	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Inspektorat I	35 Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	0	4	Kegiatan			1			1			1				1
				Inspektorat I	36 Pengukuran Capaian Kinerja	0	4	Kegiatan			1			1			1				1
				Inspektorat I	37 Pelaporan Kinerja Tahunan	0	1	Laporan													1
				Inspektorat I	38 Penyusunan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	0	2	Laporan						1							1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT I

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang dilakukan organisasi dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Pengelolaan data kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penetapan Kinerja tersebut berisi informasi sasaran kinerja beserta indikator dan target yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Pengukuran dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat I dengan tahapan awal yaitu pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap periode Triwulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis *website* di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai
1.	Istimewa	110 - 120
2.	Baik	90 - <110
3.	Cukup	70 - < 90
4.	Kurang	50 - < 70
5.	Sangat Kurang	≤ 50
6.	Belum ada Penilaian	-

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat I dari Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2025 (Januari s.d. Desember Tahun 2025). Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja dari masing-masing Sasaran Kinerja. Capaian kinerja Inspektorat I yang diukur Tahun 2025 terdiri dari capaian kinerja pada 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 7 Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, kondisi capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

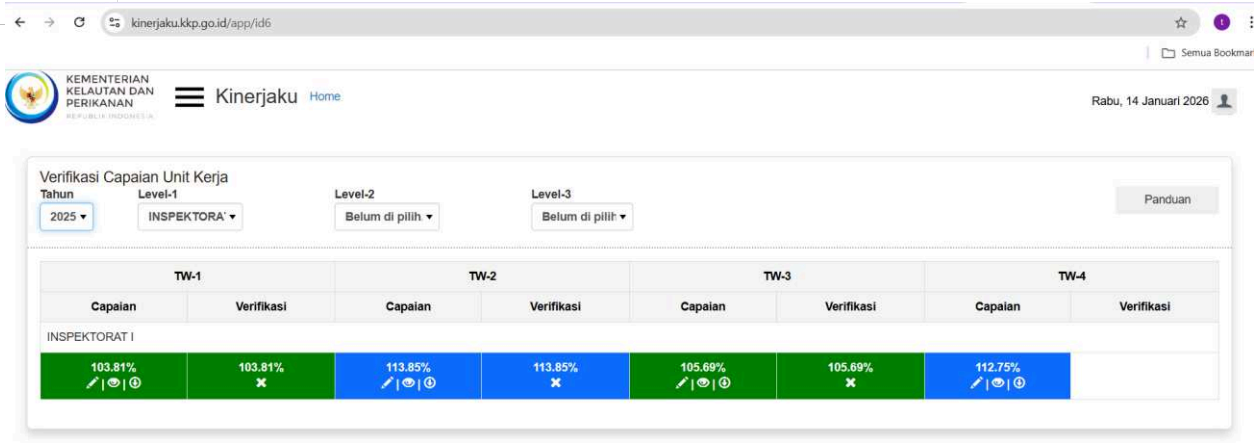

Gambar 2. Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

Gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja IK mencapai ≥110 yang berada pada zona biru atau masuk dalam kategori **"Istimewa"** dengan **skor kinerja 112,75**, adapun perkembangan capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 berdasarkan periode pengukuran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Triwulan)

Uraian	Tahun 2024	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV (Tahunan)
Capaian Kinerja Inspektorat I	107,47	103,81	113,85	105,69	112,75

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Inspektorat I mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, namun capaian di Tahun 2025 jika dibandingkan secara Triwulanan, mengalami fluktuatif dari periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Tahunan). Beberapa yang menyebabkan adanya peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya (Tahun 2024), disebabkan adanya perubahan jumlah indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, dimana jumlah indikator kinerja Tahun 2024 sebanyak 13 indikator, sedangkan di Tahun 2025 sebanyak 7 indikator kinerja, Pengurangan indikator tersebut dikarenakan terdapat beberapa indikator yang sudah tidak relevan untuk dijadikan target indikcator kinerja di Tahun 2025. Selain hal tersebut Inspektorat I telah melakukan beberapa upaya dan inovasi sehingga capaian pada masing-masing indikator kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 6 indikator kinerja telah melebihi dari target dan 1 indikator kinerja memiliki nilai capaian yang sama dengan targetnya, capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dapat disampaikan sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 7. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2024			% CAPAIAN PADA APLIKASI KINERJAKU	KET.
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5	0,17	166%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86	88,98	103,47%	103,47%	Capaian diatas target
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	90,66	106,66%	106,66%	Capaian diatas target
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4	9	225%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85	94,51	111,19%	111,19%	Capaian diatas target
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80	98,90	123,63%	120%	Capaian diatas target dengan nilai maksimal (120%)
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100%	100%	Capaian sama dengan target

Secara rinci, gambaran mengenai capaian kinerja dari masing-masing sasaran kinerja dan indikator kinerja Inspektorat I Tahun 2025 disampaikan sebagai berikut:

SK.01: Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I

Pencapaian SK.01 yang menjadi ukuran atas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang mempunyai nilai tambah pada lingkup mitra Inspektorat I diukur melalui 4 indikator kinerja dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjaku
IK-1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	Minimize	≤ 0,5	0,17	166%	120%
IK-2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	Maximize	86	88,98	103,47 %	103,47%
IK-3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	Maximize	85	90,66	106,66 %	106,66%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian pada aplikasi kinerjaku
	Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)					
IK-4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	Maximize	4	9	225%	120%

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan capaian masing-masing indikator kinerja adalah capaian IK-1 yang merupakan batas toleransi temuan pengawas eksternal (BPK-RI) dibandingkan dengan realisasi anggaran lingkup mitra Inspektorat I Tahun 2024 yaitu sebesar 0,17 atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar ≤ 0,5. Capaian IK-2 "Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I" sebesar 88,98 atau telah melebihi dari target yaitu 86, selanjutnya capaian pada IK-3 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)" sebesar 90,66, yang berarti melebihi dari target yaitu 85, serta capaian pada IK-4 yaitu "Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)" dengan realisasi 9 rekomendasi dari target 4 rekomendasi atau penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan mitra telah melebihi dari target yang ada. Berikut uraian masing-masing capaian indikator kinerja pada Sasaran Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah (SK.01) Tahun 2025.

IK-1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I

IK-1 merupakan indikator dalam mewujudkan Laporan Keuangan KKP yang handal dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) mitra Inspektorat I adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi atas hasil pemeriksaan BPK pada LK (mitra Inspektorat I) dibandingkan dengan realisasi anggaran mitra Inspektorat I Tahun 2024. Realisasi IK-1 ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga pengukuran IK-1 dilakukan secara tahunan (pengukuran dilakukan pada Triwulan III Tahun 2025) dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik).

Berdasarkan nilai temuan keuangan pemeriksaan BPK-RI Tahun 2024 pada mitra Inspektorat I yaitu Sekretariat Jenderal KKP sebesar Rp1.885.275.241,00 dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp357.650.852,00 atau total nilai temuan pada mitra sebesar Rp2.242.926.093,00 dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal KKP sebesar Rp822.863.865.685,00 dan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rp471.154.781.232,00 atau total nilai realisasi mitra sebesar Rp1.294.018.646.917,00, sehingga perhitungan perbandingan antara nilai total temuan dan nilai total realisasi pada mitra yaitu sebesar 0,17% dari target sebesar ≤ 0,5%. Capaian IK-1 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 166% atau maksimal 120% secara aplikasi kinerjaku, rincian capaian IK-1 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 9. Capaian IK-1 Tahun 2025

IK-1	2025		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5%	0,17%	166%	- Persentase jumlah temuan terhadap realisasi pada Setjen sebesar 0,23%. - Persentase jumlah temuan terhadap realisasi pada Ditjen PKRL sebesar 0,08%.

Capaian IK-1 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami penurunan/lebih rendah, dimana realisasi pada Tahun 2024 sebesar 0,07% atau nilai capaian sebesar 186%. Penurunan capaian IK-1 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan adanya peningkatan nilai temuan materialitas keuangan pada mitra sebesar Rp1.495.707.633,00 yang terdiri dari temuan pada Setjen meningkat sebesar Rp1.314.056.628,00 dan pada Ditjen PKRL sebesar Rp181.651.005,00. Adapun perbandingan target dan realisasi IK-1 Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Perbandingan Capaian IK-1 Tahun 2024 dan Tahun 2025

IK-1	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5%	0,01%	186%	≤0,5%	0,17%	166%

Target yang ditetapkan pada IK-1 selama jangka menengah bersifat stabil yaitu sebesar ≤ 0,5% hingga Tahun 2029, sehingga jika capaian tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 166% sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Capaian IK-1 Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

IK-1	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5%	0,17%	166%

Capaian atas IK-1 ini didukung oleh beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat I selama Tahun 2025, antara lain Probity Audit, Audit atas Pertanggungjawaban keuangan, Reviu Pengganggaran, Reviu LK, Reviu Pengendalian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Intern Pelaporan Keuangan, Pengawasan Pengelolaan BMN, PTL hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan Tematik Lainnya (Kegiatan Prioritas, PNBP, dll).

IK-2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)

Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup Unit Eselon I berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Unit Eselon I yang telah ditetapkan, sumber data hasil pengukuran diperoleh melalui kegiatan evaluasi oleh Inspektorat IV terhadap pelaksanaan rencana aksi RB Tahun 2025 di lingkungan KKP, dalam rangka mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi RB Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi (PAN RB).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi RB unit organisasi Eselon I Tahun 2025 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 yang telah melakukan pengukuran terhadap 12 indikator, maka nilai capaian IK-2 sebesar 88,98 melebihi dari target yang ada yaitu sebesar 86 atau nilai capaian sebesar 103,47%. Capaian tersebut merupakan rata-rata nilai capaian terhadap mitra dengan rincian sebagai berikut: 1). Pelaksanaan RB pada Setjen sebesar 90,43%, 2). Pelaksanaan RB pada Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar 87,80%, 3). Pelaksanaan RB pada Ditjen Penataan Ruang Laut sebesar 88,71%. IK-2 merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan didalam Renstra Itjen 2025-2029 yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KKP dalam rangka mewujudkan *good government governance*. Adapun capaian IK-2 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Capaian IK-2 Tahun 2025

IK-2	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	-	-	-	86	88,98	103,47%

Target IK-2 selama jangka menengah ditetapkan dengan trend meningkat mulai dari 86% di Tahun 2025 meningkat menjadi 88% di akhir jangka menengah (Tahun 2029), dan seperti diketahui bahwa capaian Tahun 2025 masih melebihi dari target jangka menengah. Perbandingan capaian IK-2 Tahun 2025 terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada table berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 13. Perbandingan Capaian IK-2 dengan Target Jangka Menengah

IK-2	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	88%	88,98%	101,11%

Capaian pada IK-2 didukung oleh komitmen dari mitra Inspektorat I dalam rangka melaksanakan indikator kinerja mandatori yang terdiri dari 12 indikator kinerja, yaitu 1). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. 2). Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK, 3). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP, 4). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), 5). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, 6). Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP, 7). Indeks Profesional ASN, 8). Nilai Pengawasan Kearsipan Internal, 9). Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP, 10). Nilai Pembangunan Integritas, 11). Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, 12). Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan SOP.

IK-3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) oleh Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah **tuntas**) oleh mitra kerja Inspektorat I atas rekomendasi pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 dengan target 85% serta pengukurannya bersifat kumulatif selama setahun.

Hasil pengukuran capaian IK-8 sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025, disampaikan bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus **tuntas**) dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat I sebesar 90,66% dari target 85%, sehingga capaiannya sebesar 106,66%. Nilai tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat I yang telah ditindaklanjuti oleh Setjen sebanyak 89 rekomendasi atau 100%, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Ditjen Pengelolaan Kelautan sebanyak 211 dari 246 rekomendasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada Ditjen Penataan Ruang Laut sebanyak 59 dari 61 rekomendasi, capaian IK-3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 14. Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2025

IK-3	2025		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85%	90,66%	106,66%	- Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklajuti pada Setjen sebesar 100%. - Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklajuti pada Ditjen Pengelolaan Kelautan sebesar 85,77% - Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklajuti pada Ditjen Penataan Ruang Laut sebesar 96,72%

Capaian IK-3 Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang memiliki nilai capaian sebesar 121,34%, hal ini disebabkan adanya perbedaan target yang ditetapkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar 80% dan Tahun 2025 sebesar 85%. Selain hal tersebut terdapat hambatan dalam penyelesaian rekomendasi pada mitra Inspektorat I sebelumnya yaitu Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengalami pemecahan unit kerja menjadi Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ditjen Penataan Ruang Laut pada Triwulan II Tahun 2025. Rincian perbandingan capaian IK-3 Tahun 2024 dan Tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2024 dan Tahun 2025

IK-3	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	80%	97,07%	121,34%	85%	90,66%	106,66%

Target yang ditetapkan pada IK-3 selama periode jangka menengah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga akhir periode jangka menengah, adapun target IK-3 di Tahun 2029 yaitu sebesar 89% atau mengalami peningkatan sebesar 4% dari target di Tahun 2025. Capain IK-3 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 101,87% atau melebihi dari target yang ada, rincian capaian IK-3 terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IK-3 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

IK-3	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	89%	90,66%	101,87%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK-3 adalah kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen terhadap mitra kerja secara Triwulanan, selain hal tersebut, dilakukan pemutakhiran data hasil pengawasan pada mitra kerja dan layanan tindak lanjut secara online melalui aplikasi SIDAK.

IK-4. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)

Rekomendasi kebijakan merupakan masukan/saran dari hasil kajian Inspektorat I yang diberikan kepada mitra kerja dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan/pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan pada mitra kerja Inspektorat I. Rekomendasi yang disampaikan dalam bentuk surat dinas Inspektur Jenderal dan/atau atas nama Inspektur Jenderal, dan/atau atas nama Inspektur kepada mitra kerja yang menjadi objek pengawasan dapat berupa kajian yang berisi saran untuk melakukan perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya. Adapun target penyampaian rekomendasi untuk perbaikan kebijakan lingkup mitra kerja Inspektorat I Tahun 2025 sebanyak 4 rekomendasi.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IK-4 diketahui bahwa telah melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu telah tersusun 9 rekomendasi dari 4 target rekomendasi kebijakan atau capaian sebesar 225%. Adapun rekomendasai yang telah disusun dan disampaikan kepada mitra sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan atas rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Nota Dinas Nomor 45/ITJ.1/TU.210/II/2025 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro SDMAO;
2. Rekomendasi kebijakan berkenaan dengan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, melalui Nota Dinas Nomor 56/ITJ/TU.210/V/2025 dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
3. Masukan/saran atas draft Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Swasembada Garam Nasional, melalui Nota Dinas Nomor 60/ITJ/TU.210/2025 dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.
4. Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 75/ITJ/HK.150/IX/2025 perihal masukan terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 80/ITJ/HK.160/IX/2025 perihal masukan terkait Rancangan Keputusan Menteri KP tentang dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut dan tim kajian penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi laut;
6. Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 110/ITJ/HK.160/XI/2025 perihal masukan terkait Rancangan Keputusan Menteri KP tentang tim verifikasi penetapan kampung lautan sejahtera;
7. Nota Dinas Inspektur I Nomor 171/ITJ.1/TU.210/IX/2025 perihal masukan terkait Rancangan Keputusan Menteri KP tentang kawasan konservasi di Perairan Maluku;
8. Nota Dinas Inspektur I Nomor 262/ITJ.1/TU.210/XII/2025 perihal masukan terkait Rancangan Instruksi Menteri KP tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
9. Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 130/ITJ/TU.210/XII/2025 perihal masukan atas rancangan Permen KP tentang perubahan kedua atas Permen KP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sendimentasi di laut.

Perkembangan capaian IK-9 Tahun 2025 sebesar 225% disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2025

IK-4	2025		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	9	225%	Sebanyak 3 rekomendasi disusun dan disampiakan pada Semester I dan sebanyak 6 rekomendasi disusun dan disampiakan pada Semester II Tahun 2025.

Capaian IK-4 Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 5 rekomendasi atau sebesar 125%, hal ini disebabkan adanya peningkatan penyusunan peraturan/pedoman pelaksanaan program/kegiatan strategis mitra yang dilakukan analisis/telaah oleh Inspektorat I untuk dilakukan koreksi/masukan sebagai perbaikan kebijakan pada mitra. Perbandingan capaian IK-4 Tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2024 dan Tahun 2025

IK-4	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	4	100%	4	9	225%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun target yang ditetapkan selama periode jangka menengah adalah tetap (*stabilized*) yaitu 4 rekomendasi, dan jika capaian Tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan, perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Perbandingan Capaian IK-4 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

IK-4	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	9	225%

Capaian ini telah sejalan dengan salah satu peran Inspektorat I yaitu sebagai konsultan (*Advisory Services*) dengan memberikan masukan/saran dalam rangka perbaikan terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan maupun pada tataran kebijakan. Kedepan kondisi ini merupakan tantangan bagi Inspektorat I untuk tetap konsisten memberikan saran/masukan terhadap kebijakan mitra melalui kegiatan telaah/kajian terhadap peraturan, kebijakan, Juknis, sistem dan prosedur administrasi/operasi lingkup mitra kerja Inspektorat I.

SK.02: Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I

Pencapaian SK.02 menjadi ukuran atas pelaksanaan pengawasan intern yang handal terhadap mitra, adapun capaiannya melalui pengukuran terhadap 3 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap SK.02 diperoleh nilai capaian sebesar 114,29 dengan rincian target dan realisasinya pada tabel berikut.

Tabel 20. Capaian Sasaran Kinerja (SK.02) Tahun 2025

Indikator Kinerja		Polarisasi	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Capaian pada aplikasi kinerjaku
IK-5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	Maximize	85	94,51	111,19%	111,19%
IK-6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	Maximize	80	98,90	123,63%	120%
IK-7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	Maximize	100	100	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan capaian masing-masing indikator kinerja adalah capaian IK-5 merupakan “nilai hasil telaah sejawat internal terhadap Inspektorat I” yaitu sebesar 94,51 dari target 85 atau nilai capaian sebesar 111,19%, capaian tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian IK-6 “Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I” sebesar 98,90 atau telah melebihi dari target yaitu 80 atau nilai capaian sebesar 120%, selanjutnya capaian pada IK-7 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I” sebesar 100 sesuai dengan target yang ditetapkan uraian masing-masing capaian indikator kinerja pada Sasaran Kinerja Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I (SK.02) Tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut.

IK-5. Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)

Telaah sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup Itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern.

Pengukuran diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat V terhadap Inspektorat I melalui Surat Tugas Nomor B.240/ITJ.5/KP.440/IV/2025 terhadap komponen standar atribut dan standar pelaksanaan untuk mendapatkan keyakinan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan audit sesuai dengan standar audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan hasil diperoleh sebesar 94,51 atau dengan simpulan “sangat baik”, hal ini menunjukan bahwa praktik pengawasan intern yang dilakukan dalam hal ini tata kelola, praktik profesional dan komunikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat I telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai standar audit. Hasil telaah sejawat internal dari Inspektorat V melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 atau capaian sebesar 111,19%. Nilai hasil telaah sejawat merupakan indikator kinerja baru yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 21. Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2025

IK-5	2025		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85	94,51	111,19%	Simpulan hasil penilaian “sangat baik”

Berdasarkan data di atas diperoleh capaian pada indikator kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan, adapun beberapa hal yang telah dilakukan Inspektorat I dalam mencapai hasil telaah sejawat internal yang “sangat baik” melalui:

a. Pemantauan terhadap pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan;
b. Pelaksanaan reviu berjenjang dalam hal penugasan pengawasan;
c. Peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor; dan
d. Pendokumentasian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024 dan Tahun 2025

IK-5	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	-	-	-	85	94,51	111,19%

Capaian IK-5 Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena merupakan indikator kinerja baru, sedangkan capaian di Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target jangka menengah dapat dijelaskan bahwa target IK-5 ditetapkan meningkat hingga akhir periode jangka menengah yaitu sebesar 87, dari target tersebut capain Tahun 2025 masih melebihi dari target sebesar 108,63%

Tabel 23. Perbandingan Capaian IK-5 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

IK-5	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	87	94,51	108,63%

IK-6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)

Merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP.

Pengukuran indikator kinerja ini diperoleh dari data yang disampaikan oleh Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Sekretariat Itjen atas kepatuhan upload laporan hasil pengawasan terhadap mitra kerja melalui aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dengan hasil pengukuran sebesar 98,90. Hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80 atau capaiannya sebesar 123,63%.

Tabel 24. Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2025

IK-6	2025		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80	98,90	123,63%	Melebihi dari target yang telah ditetapkan

Capaian kinerja yang melebihi target, diperoleh melalui upaya yang telah dilakukan melalui pemantauan terhadap kepatuhan upload laporan hasil pengawasan melalui aplikasi AMS (ams.kkp.go.id). Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dilakukan pengukuran secara Semesteran di Tahun 2025, sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan dengan periode Tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan capaian Semester I Tahun 2025 mengalami peningkatan dimana capaian Semester I Tahun 2025 sebesar 97,92.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 25. Perbandingan Target dan Realisasi IK-6 Tahun 2024 dan Tahun 2025

IK-6	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	-	-	-	80	98,90	123,63%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian IK-6 Tahun 2025 masih melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan sampai akhir periode jangka menengah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Target di Tahun 2029 sebesar 88, dan apabila target tersebut dibandingkan dengan capaian Tahun 2025, maka masih dalam katagori baik dengan nilai capaian sebesar 112,39%.

Tabel 26. Perbandingan Capaian IK-6 Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

IK-5	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2025	Capaian
Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	88	99,90	112,39%

IK-7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat I merupakan ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran yang dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran pada indikator kinerja ini diperoleh dari tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja dan anggaran melalui pemenuhan terhadap:

a. Penyampaian laporan kinerja Triwulan III Tahun 2025;
b. Pengisian data capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id);
c. Monitoring dan evaluasi Renaksi pencapaian target kinerja Triwulan III Tahun 2025;
d. Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPj) Triwulan IV Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 100% atau seluruh dokumen di atas telah dipenuhi oleh Inspektorat I secara tertib.

Tabel 27. Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2025

IK-7	2025		Capaian	Keterangan
	Target	Realisasi		
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100%	Inspektorat telah tertib menyusun dan menyampaikan dokumen pengelolaan kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun perkembangan capaian indikator kinerja ini masih sama (*stabilized*) jika dibandingkan dengan periode Tahun 2024. Berikut tabel perbandingan capaian IK-7 Tahun 2025 dengan Tahun 2024.

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi IK-7 Tahun 2024 dan Tahun 2025

IK-7	2024			2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100%	100	100	100%

Sedangkan target yang ditetapkan hingga akhir periode jangka menengah masih sama yaitu 100 (*stabilized*) dan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 nilai capaian sebesar 100%.

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat I berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA_032.02.1.622098/2025 tanggal 2 Desember 2024, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.502.179.000,00 serta mengalami perubahan menjadi Rp4.971.127.000,00 atau sebesar 6,07% dari anggaran total Inspektorat Jenderal sebesar Rp81.913.169.000,00. Sehubungan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Itjen KKP melaksanakan efisiensi anggaran sebesar Rp36.881.656,00 atau 45,03% dari pagu awal, dan hal ini berdampak pada anggaran yang dikelola Inspektorat I menjadi sebesar **Rp461.398.000,00,** terdiri dari: kegiatan pengawasan intern pada mitra sebesar Rp428.208.000,00 dan pelaksanaan pengawasan kegiatan prioritas/strategis mitra sebesar Rp33.190.000,00. Dalam rangka pencapaian program prioritas nasional yang dijalankan oleh KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat Nomor B.1163/MEN-KP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 mengusulkan pembukaan blokir anggaran belanja Tahun 2025 sebesar **Rp786.085.000.000,00** dan telah disetujui Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-985/AG/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025 perihal pengesahan revisi anggaran pembukaan blokir hasil efisiensi TA 2025 pada Inspektorat Jenderal KKP, sehingga berdampak pada penambahan anggaran Inspektorat I yaitu sebesar Rp313,239,000,00 dengan pagu efektif yang dikelola Inspektorat I menjadi sebesar **Rp774.637.000,00**.

Perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2025 secara akrual sebesar **Rp774.028.423,00** atau sebesar 99,92% dan sisa anggaran sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rp607.877,00 atau sebesar 0,08% dari pagu efektif. Adapun rincian realisasi anggaran yaitu terdiri dari belanja bahan sebesar Rp37.783.300,00, belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp685.885.123,00, perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp42.710.000,00 dan perjalanan dinas dalam rangka pertemuan dalam kota sebesar Rp7.650.000,00. Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
051.A.Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I				
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	326.255.000	326.254.108	892
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.737.000	40.710.000	27.000
051.C.Dukungan Operasional Pengawasan				
1	Belanja Bahan	37.784.000	37.783.300	700
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.782.000	15.782.000	0
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.650.000	7.650.000	0
052.A.Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I				
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.190.000	33.190.000	0
061.M.Pengawasan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	311.239.000	310.659.015	579.985
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	2.000.000	0
Total		**774.637.000**	**774.028.423**	**608.577**

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi anggaran Inspektorat I Tahun 2025 sangat baik dengan realisasi anggaran 99,92% dan capaian output secara keseluruhan mencapai optimal 100%. Realisasi anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024 yang mencapai 99,99% hal ini merupakan bentuk efisiensi pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Inspektorat I, namun secara umum kondisi capaian realisasi anggaran menunjukan bahwa upaya pelaksanaan anggaran yang ditetapkan cukup efektif dan berjalan sesuai yang direncanakan. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Inspektorat I dari Tahun 2024 dan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat I TA 2024 dan Tahun 2025

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2024	5.801.222.000,00	5.801.067.065,00	99,99
2025	774.637.000,00	774.028.423,00	99,92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Inspektorat I Tahun 2025 dilaksanakan melalui pencapaian 2 Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya melalui 7 Indikator Kinerja. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran Inspektorat I disusun untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya Sasaran Kinerja melalui kegiatan pengawasan terhadap mitra.

Kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan selama Tahun 2025 meliputi Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I, Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I, Pengawasan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dan Dukungan Operasional Pengawasan. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31. Pagu dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
SK.01 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I; SK.02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I.	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	366.992.000	366.964.108	99,99
	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I	33.190.000	33.190.000	99,99
	Pengawasan Kegiatan Prioritas Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	313.239.000	312.659.015	100
	Dukungan Operasional Pengawasan	61.216.000	61.215.300	99,99
TOTAL		**774.637.000**	**774.028.423**	**99,92**

3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran pada sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja sebuah organisasi sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja *value for money* dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam *value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Konsep pokok *value for money* antara lain:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauhmana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan input tertentu atas penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Dalam hal ini, efisiensi merupakan perbandingan realisasi output dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada konsep dan kriteria diatas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat I telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

   Pengelolaan anggaran Inspektorat I Tahun 2025 telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran kinerja dan target kinerja dan telah melalui proses reviu yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan Tahun 2025, Inspektorat I menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat I diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM yang berkualitas dengan biaya yang rendah.
2. Efektif

   Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2025, diketahui bahwa dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, sebanyak 6 indikator kinerja dapat dicapai melebihi target dan 1 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja ditunjukkan dengan skor kinerja mencapai **112,75%** atau diatas target yang diharapkan. Capaian kinerja tersebut didukung dengan penganggaran yang dikelola secara efektif serta adanya proses pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan, auditor beserta tim pengelola kinerja Inspektorat I.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran pengawasan lingkup Inspektorat I Tahun 2025 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran lingkup Inspektorat I dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 dapat dinilai efisien karena dengan dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,92%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi/sesuai target (**skor kinerja 112,75%**). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan output yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 99,92% sedangkan capaian output dari masing-masing kegiatan mencapai 100,00% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,08% dalam menghasilkan output yang optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Penggunaan sumber daya anggaran sebesar 99,92% dapat menghasilkan kinerja organisasi Inspektorat I Tahun 2025 pada level “Istimewa” dengan nilai kinerja organisasi sebesar 112,75%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya anggaran Inspektorat I digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,92%) dapat menghasilkan kinerja organisasi yang melebihi target dengan skor kinerja sebesar 112,75%. Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi sebesar 12,83%.

Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian output dan capaian kinerja organisasi Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Efisiensi Anggaran Inspektorat I Tahun 2025
Per Jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran (*Input*)	**Realisasi Hasil**		**Efisiensi**
99,92% Dari pagu anggaran **Rp774.637.000**	*Output*	100%	0,08%
	Skor Kinerja Organisasi Inspektorat I	112,75%	12,83%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan penerapan dari perencanaan pengawasan yang berbasis risiko, optimalisasi pelaksanaan pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa tema pengawasan yang memungkinkan untuk dilakukan dalam satu waktu sehingga meminimalisir pelaksanaan pengawasan yang bertubi-tubi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan (pengawasan secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

daring/*online/desk*) sehingga dapat mengurangi biaya pengawasan dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

D. REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai 2 Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya dengan 7 Indikator Kinerja didalam dokumen perencanaan Tahun 2024, maka ditetapkan Rencana Aksi (Renaksi) yang menguraikan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan. Kegiatan pendukung yang telah ditetapkan didalam dokumen Renaksi Tahun 2025 sebanyak 129 kegiatan dan telah dilaksanakan sebanyak 130 kegiatan atau capaiannya sebesar 100,78%. Secara rinci capaian Renaksi Tahun 2025 menjadi lampiran pada laporan kinerja ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat I selama Tahun 2025 antara lain:

1. Adanya perubahan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur I pada Triwulan IV Tahun 2025 terkait pergantian Jabatan Inspektur Jenderal.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 adalah **"Istimewa"** dengan capaian skor kinerja organisasi sebesar **112,75%** dan secara umum capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 diatas target yang ditetapkan, sehingga perlu dipertahankan dalam capaian kinerja pada masing-masing indicator kinerja di waktu yang akan datang.
3. Nilai kinerja organisasi Inspektorat I sebesar 112,75% merupakan rata-rata capaian terhadap 2 Sasaran Kinerja yang diukur keberhasilannya melalui 7 Indikator Kinerja. Capaian terhadap sasaran kinerja (SK-1) "Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I" sebesar 111,21% dan pada sasaran kinerja (SK-2) "Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat I" sebesar 114,29%.
4. Beberapa capaian kinerja Inspektorat I Tahun 2025 yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja Itjen KKP, antara lain:
   a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I sebesar 0,17%, dari total realisasi anggaran mitra Inspektorat I atau jauh melebihi target yaitu ≤ 0,5%;
   b. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat dengan capaian 88,98% dari target sebesar 86%.
   c. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 106,66%%.
   d. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I mencapai 9 rekomendasi melebihi dari target yaitu 4 rekomendasi.
   e. Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai) mencapai 94,51 atau capaian sebesar 111,19%;
   f. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%) mencapai 98,90 atau capaiannya sebesar 123,63%;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I sesuai dengan target yaitu 100%.

5. Penyerapan anggaran Tahun 2025 sebesar 99,92 atau sebesar Rp774.028.423,00 dari pagu efektif sebesar Rp774.637.000,00. Realisasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan capaian output kegiatan sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 112,75% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat I Tahun 2025 telah efisien, dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih tinggi.

B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak terdapat kendala/permasalahan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat I Tahun 2025. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dari 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum telah melebihi dari target yang ditetapkan. Namun demikian, tantangan yang akan dihadapi dalam melaksanakan pengawasan kedepan akan semakin komplek, dengan adanya kebijakan efiiensi anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia (Auditor), Inspektorat I dituntut dapat memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan mitra dalam mendukung program/kegiatan strategis KKP maupun program strategis Presiden telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kegiatan dan terhindar dari penyimpangan. Untuk itu, perencanaan pengawasan harus disusun melalui pendekatan penilaian risiko sehingga pelaksanaan pengawasan tepat sasaran, selain itu penggunaan teknologi informasi yang maksimal dalam membantu pelaksanaan pengawasan kepada mitra kerja.

C. LANGKAH PERBAIKAN

Dalam rangka perbaikan pencapaian target kinerja organisasi Inspektorat I kedepan, maka perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Melakukan penilaian resiko terhadap program/kegiatan strategis yang menjadi fokus kegiatan mitra sebagai dasar dalam menyusun program pengawasan;
b. Pemanfaatan sistem informasi untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan (penggunaan repository KKP dalam pelaksanaan pengawasan secara daring).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Tindak lanjut Saran/Rekomendasi

Beberapa hal yang telah disampaikan sebagai langkah perbaikan didalam laporan sebelumnya, telah ditindaklanjuti seluruhnya, adapun hal perbaikan yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Inspektorat I telah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan mitra sebagai dasar penyusunan PKPT serta mengkomunikasikan rencana pengawasan kepada mitra;
2. Melakukan pengendalian terhadap rencana dan pelaksanaan pengawasan secara berjenjang melalui pemanfaatan sistem informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Lampiran Laporan Kinerja dapat diunduh melalui laman: (https://drive.google.com/drive/folders/1uBWilj3qnLbHQuQQL_MnXhO1lM5sSBk?usp=drive_link)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara